



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
KOMISI II DPR RI  
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI  
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN  
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: I
Rapat Ke-	: 32
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum (Audiensi)
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin, 16 Desember 2019
Waktu	: Pukul 14.30 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komsii II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Audiensi terkait Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru
Ketua Rapat	: <b>H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung/Ketua Komisi II DPR RI</b>
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set. Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 33 (tiga puluh tiga) dari 50 (lima puluh) Anggota Komisi II DPR RI B. Ketua DPRD Provinsi Maluku C. Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) D. Panitia Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya E. Ketua Tim Pemekaran Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya F. Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah G. Ketua Forum Kepala Daerah Se Tanah Tabi dan Saireri H. Ketua Umum KNP3 Kepulauan Buton I. Ketua Umum FORKONAS PP DOB Seluruh Indonesia

## **I. PENDAHULUAN**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum (Audiensi) Komisi II DPR RI dengan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Panitia Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Ketua Tim Pemekaran Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah, Ketua Forum Kepala Daerah Se Tanah Tabi dan Saireri, Ketua Umum KNP3 Kepulauan Buton, dan Ketua Umum FORKONAS PP DOB Seluruh Indonesia dengan agenda Audiensi terkait Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru, hari Senin, 16 Desember 2019, dibuka pukul 14.30 WIB oleh Ketua Komisi II DPR RI, H. Ahmad Doli Kurnia Tandjung, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. CATATAN RAPAT**

Beberapa hal yang dibahas pada rapat tersebut, sebagai berikut:

1. Ketua ADEKSI menyampaikan aspirasi dan memberikan masukan terkait rencana revisi Undang-Undang Pilkada terutama menekankan terhadap kesetaraan warga negara ketika mencalonkan sebagai kepala daerah.
2. Perwakilan Pemerintahan Provinsi Papua Barat menyampaikan aspirasi dukungannya terhadap pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, sekaligus menegaskan telah melantik Panitia Pemekaran Provinsi Papua Barat

Daya yang akan bekerja mempercepat proses pemekaran Daerah Otonomi Baru tersebut.

3. Ketua Tim Pemekaran Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menyampaikan aspirasi bahwa pembentukan DOB Papua Barat Daya telah sesuai dengan ketentuan Otonomi khusus Papua, sehingga sudah memenuhi syarat untuk disahkan.
4. Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah menyampaikan aspirasi agar segera direalisasikan pengaktifan DOB Provinsi Papua Tengah, karena inisiasi pemekaran daerah tersebut sudah diinisiasi sejak tahun 2009 dan sempat diundangkan, hanya pengaktifannya tertunda akibat Yudisial review dari Mahkamah Konstitusi.
5. Ketua Forum Kepala Daerah Se Tanah Tabi dan Saireri menyampaikan aspirasi untuk diberikan dukungan dalam pembentukan DOB yang dapat menaungi 5 wilayah adat di wilayah adat Tanah Tabi dan Saireri.
6. Ketua Umum KNP3 Kepulauan Buton menyampaikan aspirasi untuk diberikan dukungan dalam pembentukan DOB Provinsi Buton untuk menjaga tradisi adat Buton serta meningkatkan perkembangan wilayah daerah Buton.

7. Ketua Umum FORKONAS PP DOB seluruh Indonesia menyampaikan aspirasi agar DPR segera mendorong Pemerintah memperjelas status pengesahan usulan DOB yang akan disiapkan, sehingga dapat memberikan informasi yang *valid* mengenai skema pemekaran wilayah di Indonesia.
  
8. Komisi II DPR RI telah mendengarkan audiensi terkait Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru yang disampaikan Ketua DPRD Provinsi Maluku, Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI), Panitia Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Ketua Tim Pemekaran Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Ketua Tim Pemekaran Provinsi Papua Tengah, Ketua Forum Kepala Daerah Se Tanah Tabi dan Saireri, Ketua Umum KNP3 Kepulauan Buton, dan Ketua Umum FORKONAS PP DOB Seluruh Indonesia. Setelahnya, Komisi II DPR RI akan melakukan pendalaman atas audiensi tersebut sebagai bahan dalam rapat intern Komisi II DPR RI.

### III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 16.50 WIB.

Jakarta, 16 Desember 2019  
KETUA RAPAT

  
H. AHMAD DOLI KURNIA TANDJUNG  
A-270